

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maju dan berkembangnya sebuah negara bukan terletak pada seberapa besar luas wilayah yang dimiliki, seberapa banyak kekayaan alam yang terkandung, seberapa lama negara tersebut telah berdiri, serta bukan pula terletak pada seberapa banyak warga negara yang mendiami wilayah negara tersebut, melainkan terletak pada pendidikannya, karena pendidikan merupakan investasi sebuah negara, karena dengan pendidikan semua masyarakat dapat turut berperan dalam pembangunan. Sebagian dikemukakan Budimansyah (2004:102), bahwa:

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu investasi SDM (*Human Capital Investment*) sehingga mampu menciptakan iklim yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk turut andil atau berperan serta dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan.

Begitu besarnya peranan pendidikan bagi kelangsungan serta perkembangan negara kita, maka, pemerintah mencantumkan hal tersebut sebagai salah satu tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu“ Mencerdaskan kehidupan bangsa...”. Selain itu tujuan serta fungsi pendidikan Nasional tercantum pula dalam pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003, sebagai berikut:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi masusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional tersebut, terdapat aspek penting yang diharapkan tercapai, yaitu bagaimana menjadikan warga negara sebagai warganegara yang baik (*to be good citizenship*). Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) menjadi salah satu mata pelajaran yang memegang peranan penting dalam rangka pembentukan karakter tersebut. Hal ini senada dengan apa yang dituangkan oleh Maftuh dan Sapriya (2005: 320), dimana tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah:

“... agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizenship*), yakni warga yang memiliki kecerdasan (*civil Intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*civil responsible*); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*civil Participation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air.”

Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya tujuan penting dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk karakter warga negara yang baik. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa komponen yang harus termuat dalam pendidikan Kewarganegaraan, yang menurut Margaret S. Branson (1999:8) terdapat tiga komponen penting dalam pendidikan Kewarganegaraan, yaitu “*Civic Knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *Civic Skills* (kecakapan kewarganegaraan), dan *Civic Dispositions* (watak-watak kewarganegaraan)”. Dengan demikian, muatan Pendidikan Kewarganegaraan mampu memberikan bekal yang baik bagi warga negaranya, dimulai dari pengetahuan, kecakapan serta watak atau karakter yang seharusnya dimiliki oleh masing-masing individu.

Dalam pelaksanaannya, Pendidikan Kewarganegaraan belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal tersebut, dapat dilihat dari sisi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang cenderung menitikberatkan pada aspek kognitif saja, sedangkan aspek yang lain seperti afektif dan psikomotorik belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Winataputra dan Budimansyah (2007:118) yaitu:

Proses pembelajaran dan penilaian dalam PKn lebih menekankan pada dampak Instructional (*Instructional effect*) yang terbatas pada penguasaan materi (*content mastery*) atau dengan kata lain hanya menekankan pada dimensi kognitifnya saja. Sedangkan pengembangan dimensi-dimensi lainnya (afektif dan psikomotorik) dan pemerolehan dampak pengiring (*nurturant effect*) sebagai “*hidden curriculum*” belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Hasil di atas diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Udin S. Winataputra sebagaimana yang dikutip oleh Sapriya (2001:58) yang menunjukkan bahwa adanya kelemahan-kelemahan yang mendasar pada PKn, salah satunya adalah keterisolasian proses pembelajaran dari konteks keilmuan dan lingkungan sosial budaya.

Di sisi lain, hasil Studi tentang *Civic Education* yang dilakukan oleh *National Foundation for Educational Research in England and Wales* (NFER) menghasilkan beberapa temuan, diantaranya adalah deskripsi tentang “*citizenship education continuum*” MINIMAL dan MAKSIMAL (Kerr, 1999:5). Kerr mengemukakan bahwa di negara-negara Asia Tenggara “*citizenship education*” lebih mencerminkan kategori “MINIMAL” dengan ciri-ciri *thin, exclusive, elitist, civics education, formal, content led, knowledge based, didactic transmission, easier to achieve and measure in practice*, maksud pernyataan tersebut adalah

bahwa PKn didefinisikan secara sempit, hanya mewadahi aspirasi tertentu, berbentuk pengajaran kewarganegaraan, bersifat formal, terikat oleh isi, berorientasi pada pengetahuan, menitikberatkan pada proses pengajaran, hasilnya mudah diukur. Di mana PKN hanya sebagai “*Education About Citizenship*”, yaitu memusatkan perhatian pada “...*providing students with sufficient knowledge and understanding of national history and the structures and processes of government and political life*” yaitu memberikan siswa pengetahuan dan pemahaman yang komperhensif mengenai sejarah nasional dan sturktur dan proses pemerintahan dan kehidupan berpolitik.

Hasil penelitian lapangan yang mendukung, diantaranya dijelaskan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Satria (2008:161) pada salah satu SMAN di Kota Bandung, bahwa “Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di SMAN 24 Bandung masih didominasi oleh pengembangan aspek kognitif, yang menyebabkan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bersifat *didactic transmission*” . Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan masih bersifat formal dan mengutamakan konten, hal ini seperti hasil penelitian di salah satu SMAN pada cluster 1 di Kota Bandung :

... dilihat dari pendekatan dan proses belajarnya, pembelajaran PKN di SMA Negeri 2 Bandung bersifat konvensional, yang ditandai oleh rendahnya kreatifitas guru dalam pengembangan kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan ke dalam silabus dan RPP. Pembelajaran hanya dilakukan di dalam kelas, didominasi oleh metode ceramah dan diskusi, dan menekankan pada penguasaan materi semata, fasilitas pembelajaran yang tersedia tidak dimanfaatkan secara maksimal, sehingga pembelajaran PKN di SMA Negeri 2 Bandung bersifat formal dan mengutamakan konten. Permana (2007:125)

Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini berusaha mengungkapkan bagaimana isi dan modus Pendidikan Kewarganegaraan pada setiap cluster SMAN di Kota Bandung. Penelitian ini dikemas dalam judul penelitian: STUDI KOMPARATIF TENTANG ISI DAN MODUS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ANTAR CLUSTER SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KOTA BANDUNG.

B. Rumusan Masalah

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah : Bagaimana karakteristik Isi dan Modus Pendidikan Kewarganegaraan SMAN di Kota Bandung apabila dilihat dari clusterr? Secara khusus dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah semakin baik Cluster sekolah, cenderung mengembangkan isi Pendidikan Kewarganegaraan lebih kearah *values based* daripada *knowledge based*?
2. Apakah semakin baik cluster sekolah, pencapaian visi dan misi Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk Warga Negara yang baik dan cerdas, cenderung menuju arah *inclusive* dari pada *exclusive*?
3. Apakah semakin baik cluster sekolah, proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan cenderung berkembang menuju arah *interactive interpretation* dari pada *didactic transmission* ?
4. Apakah semakin baik cluster sekolah, aspek penilaian Pendidikan Kewarganegaraan cenderung berkembang menuju arah *more difficult to*

achieve and measure in practice dari pada *easier to achieve and measure in practice*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan karakteristik Isi dan Modus Pembelajaran PKN di SMAN di Kota Bandung. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui apakah semakin baik Cluster sekolah, cenderung mengembangkan isi Pendidikan Kewarganegaraan lebih kearah *values based* daripada *knowledge based*.
2. Mengetahui apakah semakin baik cluster sekolah, pencapaian visi dan misi Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk Warga Negara yang baik dan cerdas, cenderung menuju arah *inclusive* dari pada *exclusive*.
3. Mengetahui apakah semakin baik cluster sekolah, proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan cenderung berkembang menuju arah *interactive interpretation* dari pada *didactic transmission*.
4. Mengetahui apakah semakin baik cluster sekolah, aspek penilaian Pendidikan Kewarganegaraan cenderung berkembang menuju arah *more difficult to achieve and measure in practice* dari pada *easier to achieve and measure in practice*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, yaitu pengembangan keilmuan PKN, khususnya untuk Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Kewarganegaraan pada umumnya, dalam hal pembelajara PKn.
2. Manfaat praktis, yaitu :
 - a. Bagi guru mata pelajaran PKN disekolah Menengah Atas, dapat memperbaiki porses pembelajaran, sehingga tidak hanya ranah kognitif saja yang diberikan akan tetapi ranah afektif dan psikomotor juga dapat tersampaikan pada siswa
 - b. Guru dapat mengembangkan inovasi dalam menggunakan metode pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan efektif.

E. Variabel Penelitian

Aspek-aspek yang akan diteliti dalam penelitian kali ini terdiri dari 4 (empat) indikator, yaitu:

1. Isi PKN di Sekolah Menengah Atas (*Knowledge Based- value based*)

a. Knowledge Based

Knowledge Based menurut David Kerr (1999:7) ialah Pendidikan Kewarganegaraan yang hanya mencakup kemahiran pengetahuan dan pemahaman saja. PKN hanya dibelajarkan pada ranah kognitif saja. Menurut Bloom (Syamsudin, 2005: 167) indikator dari ranah kognitif itu sendiri adalah kemampuan yang mencakup :

- C1 Pengamatan/ perseptual (dapat menunjukan/membandingkan)
- C2 Hafalan/ingatan (dapat menyebutkan/ menunjukan lagi)
- C3 Pengertian/pemahaman (dapat menjelaskan/ mendefinisikan dengan kata-kata sendiri)
- C4 Aplikasi/ penggunaan (dapat memberikan contoh/menggunakan dengan tepat)
- C5 Analisis (dapat menguraikan / mengklasifikasikan)
- C6 Sintesis (dapat menghubungkan/ menyimpulkan)
- C7 Evaluasi (dapat memberikan kritik/ memberikan pertimbangan)

b. *Value based* (berbasis pada nilai/value).

Value menurut Jack R. Fraenler (1997) merupakan idea atau konsep yang bersifat abstrak tentang apa yang dipikirkan seseorang atau dianggap penting oleh seseorang. Dan biasanya mengacu pada estetika (keindahan), etika (pola laku lampah), dan logika (benar salah) atau keadilan. Dimana menurut Bloom (Syamsudin, 2005: 167) indikator dari ranah afektif ini adalah kemampuan yang mencakup:

- E1 Penerimaan (bersikap menerima/menyetujui atau sebaliknya)
- E2 Sambutan (bersedia terlibat/berpartisipasi)
- E3 Penghargaan/apresiasi (memandang penting/ bernilai)
- E4 Internalisasi/pendalaman (mengakui/ mempercayai/ meyakini)
- E5 Karakterisasi (membiasakan/ melembagakan)

2. Penyelenggaraan PKN di Sekolah Menengah Atas (*Exclusive- inclusive*)

a. *Exclusive*

Diartikan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan tidak dikaitkan dengan ilmu-ilmu social yang lain yang relevan dengan materi pokok yang diajarkan. (Kerr :1999). Dimana ciri-ciri atau indikator dari PKN yang bersifat *exclusive*, menurut Soemantri (2001:307) yaitu:

- Bahan pelajaran tidak diambil dari disiplin ilmu sosial
- PKN tidak diajarkan dengan memperhatikan bahan ajar yang diambil dari lingkungan masyarakat
- PKN kurang mampu untuk melihat respon siswa baik *formal* dan *informal content*.

b. *Inclusive*

Diartikan bahwa PKN merupakan ilmu pengetahuan sosial atau studi sosial yang dihubungkan dengan subjek dan area kurikulum lainnya sehingga ilmu sosial dapat mendukung mata pelajaran PKN. Dengan demikian, memberikan jalan untuk PKN yang lebih khusus dalam kurikulum (Kerr, 1999:29). Adapun ciri-ciri atau indikator dari PKN yang bersifat *inclusive*, dapat dilihat dari penjelasan Paul R. Hanna dan Jhon R. Lee (Suriahkusumah, 1992:36) yaitu:

- Bahan pelajaran PKN diambil dari disiplin ilmu sosial
- PKN diajarkan dengan memperhatikan bahan ajar yang diambil dari lingkungan masyarakat
- PKN mampu melihat respon siswa baik *formal* dan *informal content*

3. Proses Pembelajaran PKN di Sekolah Menengah Atas (*didactic transmission- interactive interpretation*).

a. *Didactic Transmission*

Menurut (Kerr, 1999:14-15) adalah “Pembelajaran yang menitik beratkan pada proses pengajaran”. Salah satu indikasinya, bahwa dalam proses pembelajaran PKN tidak seharusnya memposisikan peserta didik sebagai pendengar ceramah guru atau dosen (Budimansyah, 2004:4). Dimana karakteristik pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang bersifat *didactic transmission* menurut David Kerr (1999:15) adalah :

- Pengajaran berpusat pada guru,
- pengajaran hanya terbatas di kelas
- kelas dijadikannya sebagai media yang dominan, serta
- terdapat sedikit kesempatan atau dukungan untuk inisiatif dan interaksi siswa”

b. *interactive interpretation*

Diartikan bahwa proses pembelajaran PKN menitikberatkan pada partisipasi siswa melalui pencapaian konten dan proses interaktif di dalam maupun di luar kelas (Kerr, 1999). PKN hendaknya merupakan sebuah kombinasi dari partisipasi, kooperatif dan usaha untuk mendorong usaha ingin tau siswa, Winataputra,(2007). Selain itu, Charles B. Myers (dalam Kosasih Djahiri, 2007:23-24), mengatakan bahwa proses pembelajaran PKN yang ideal adalah proses KBS yang *active* dan *powerful* karena bahan ajar, kegiatan, media dan sumber mampu mengundang,

melibatkan dan memberdayakan seluruh potensi dan lingkungan belajarnya serta mampu membina siswa menjadi *independent* dan *self-regulated learners*.

Dari uraian diatas, dapat ditarik beberapa ciri dari penilaian PKN yang *interactive interpretation*, adalah:

- adanya proses pembelajaran PKN yang partisipatif
- adanya proses pembelajaran PKN yang kooperatif
- adanya proses pembelajaran PKN yang mendorong siswa untuk ingin tau.
- Terdapatnya bahan ajar, kegiatan, media dan sumber yang mengundang, melibatkan dan memberdayakan seluruh potensi dan lingkungan belajar siswa.

4. Penilaian PKN di Sekolah Menengah Atas (*easier to achieve and measure in practice- more difficult to achieve and measure in practice*)

a. *easier to achieve and measure in practice*

Menurut Kerr (1999:14) diartikan sebagai hasil dari Penilaian PKN mudah untuk diukur. Diungkapkan oleh Budimansyah (2004:7), bahwa “Pembelajaran dan penilaian PKN lebih menekankan pada dampak Instructional yang terbatas pada penguasaan materi atau dengan kata lain hanya menekankan pada dimensi kognitifnya saja. Sedangkan pengembangan dimensi afektif dan psikomotorik serta perolehan dampak pengiring sebagai *hidden curriculum* belum mendapatkan perhatian”.

Dari uraian diatas, dapat dilihat beberapa ciri dari indicator *easier to achieve and measure in practice*, yaitu:

- penilaian PKN lebih menekankan pada dampak instruksional yang terbatas pada penguasaan materi atau dimensi kognitif saja
- penilaian dimensi afektif dan psikomotorik belum optimal.
- Belum diperhatikannya dampak pengiring sebagai *hidden curriculum*.

b. more difficult to achieve and measure in practice

Diartikan bahwa penilaian hasil dalam PKN lebih sukar dicapai dan diukur, karena kompleksnya hasil belajar (Kerr, 1999:14). Agar diperoleh hasil belajar yang objektif dalam pengertian menggambarkan prestasi dan kemampuan siswa sebagaimana adanya, penilaian harus menggunakan berbagai alat penilaian dan sifatnya komprehensif, maksudnya segi atau abilitas yang dinilainya tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik (Sudjana, 2005:8). Selain itu, menurut Budimansyah (2004:5) bahwa “penilaian dalam PKN harus menerapkan prinsip penilaian proses dan Hasil”.

Dimana penilaian proses ialah upaya pemberian nilai terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta didik, sedangkan penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai dengan menggunakan kriteria tertentu. Hasil belajar tersebut pada hakikatnya merupakan pencapaian kompetensi-kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak.

Dari uraian diatas, dapat beberapa ciri dari indicator *more difficult to achieve and measure in practice* , yaitu:

- Aspek penilaian tidak hanya ranah kognitif akan tetapi ranah afektif serta psikomotorik juga
- Prinsip penilaian PKN tertuju pada bentuk penilaian proses dan Hasil.

F. Kerangka Pemikiran

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam "nation and character building" (Dasim & Udin, 2007), menurut John Cogan dalam Winataputra (2001:132) "... the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives", maksudnya adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya.

Dimana Pendidikan Kewarganegaraan ini memiliki misi sebagai berikut (Bunyamin maftuh&Sapriya, 2005:321) ;

1. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik, yang berarti program pendidikan ini memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada siswa agar mereka mampu hidup sebagai warga negara yang memiliki tingkat kemelekan politik (*political literacy*) dan kesadaran politik (*political awareness*), serta kemampuan berpartisipasi politik (*political participation*) yang tinggi.

2. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum, yang berarti bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina siswa sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari akan hak dan kewajibannya, dan yang memiliki kepatuhan terhadap hukum yang tinggi.
3. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai (*value education*), yang berarti melalui Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan tertanam dan tertransformasikan nilai, moral, dan norma yang dianggap baik oleh bangsa dan negara kepada diri siswa, sehingga mendukung bagi upaya *nation and character building*.

Margaret S. Branson (1999:5) mengidentifikasi tiga komponen penting dalam Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu *Civic Knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *Civic Skills* (keterampilan kewarganegaraan), dan *Civic Disposition* (watak-watak kewarganegaraan).

Komponen pertama, *civic knowledge* “berkaitan dengan kandungan atau nilai apa yang seharusnya diketahui oleh warganegara” (Bransons 1999:8). Aspek ini menyangkut kemampuan akademik-keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral. Dengan demikian, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang kajian multidisipliner. Secara lebih terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non-pemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasar hukum (*rule of law*) dan peradilan yang

bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

Kedua, *Civic Skills* meliputi keterampilan intelektual (*intellectual skills*) dan keterampilan berpartisipasi (*participatory skills*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh keterampilan intelektual adalah keterampilan dalam merespon berbagai persoalan politik, misalnya merancang dialog dengan DPRD. Contoh keterampilan berpartisipasi adalah keterampilan menggunakan hak dan kewajibannya di bidang hukum, misalnya segera melapor kepada polisi atas terjadinya kejahatan yang diketahui.

Ketiga, *Civic Disposition* (Watak-watak kewarganegaraan), komponen ini sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substantif dan esensial dalam mata pelajaran PKn. Dimensi watak kewarganegaraan dapat dipandang sebagai "muara" dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya. Dengan memperhatikan visi, misi, dan tujuan mata pelajaran PKn, karakteristik mata pelajaran ini ditandai dengan penekanan pada dimensi watak, karakter, sikap dan potensi lain yang bersifat afektif.

Untuk mencapai ketiga komponen diatas, diperlukan suatu bentuk pembelajaran yang menyeluruh, dimana semua komponen, baik civic Knowledge, civic skill and civic disposition dapat dimiliki oleh siswa. Sehingga siswa mampu untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokratis, berpikir secara kritis, dan bertindak secara sadar dalam dunia yang plural.

Penelitian tentang *Civic Education* telah dilakukan oleh *National Foundation for Educational Research in England and Wales* (NFER) yang

menghasilkan beberapa temuan, diantaranya adalah deskripsi tentang “*citizenship education continuum*” MINIMAL dan MAKSIMAL (Kerr, 1999:5). *Citizenship Education* pada titik minimal ditandai oleh “*thin, exclusive, elitist, civics education, formal, content led, knowledge based, didactic transmission, easier to achieve and measure in practice* (Kerr, 1999:6)”. Maksudnya adalah didefinisikan secara sempit, hanya mewadahi aspirasi tertentu, berbentuk pengajaran kewarganegaraan (*Civic Education*), bersifat formal, terikat oleh konten, berorientasi pada pengetahuan, menitikberatkan pada proses pengajaran, hasilnya mudah diukur.

Adapun *Citizenship Education* pada titik maksimal ditandai oleh “*thick, inclusive, activist, citizenship education, participative, process led, values based, interactive interpretation, more difficult to achieve and measure in practice*” (Kerr, 1999:7). Artinya bahwa *Citizenship Education* diartikan secara luas, mewadahi berbagai aspirasi dan menitikberatkan berbagai unsur masyarakat, kombinasi pendekatan formal dan informal, dilabeli “*citizenship education*”, menitikberatkan pada partisipasi siswa melalui pencarian konten dan proses interaktif di dalam maupun di luar kelas, hasilnya lebih sukar dicapai dan diukur karena kompleksnya hasil belajar.

Dari hasil penelitiannya, Kerr (1999:16) mengemukakan bahwa di negara-negara Asia Tenggara “*citizenship education*” lebih memperlihatkan pada kategori “MINIMAL” sebagai “*Education About Citizenship*”, yaitu memusatkan perhatian pada “...*providing students with sufficient knowledge and understanding of national history and the structures and processes of government and political*

life”, yaitu ..memberikan siswa pengetahuan dan pemahaman yang komperhensif mengenai sejarah nasional dan sturktur dan proses pemerintahan dan kehidupanberpolitik.

Secara khusus, dalam hal pendekatan dan proses pembelajaran, Pendidikan Kewarganegaraan dalam kategori minimal ditandai oleh sifat “*ekslusif, didactic transmission, easier to achieve and measure in pracitce, formal dan content led...*” (Ker, 1999:16) atau proses pembelajarannya dilakukan secara sempit, menitikberatkan pada proses pengajaran hasilnya mudah diukur, bersifat formal dan berpusat pada materi pelajaran.

Hasil diatas diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Udin S. Winataputra sebagaimana yang dikutip oleh Sapriya (2001:58) yang menunjukkan bahwa adanya kelemahan-kelemahan yang mendasar pada PKN, salah satunya adalah keterisolasian proses pembelajaran dari konteks keilmuan dan lingkungan sosial budaya. Selain itu, terdapat indikasi empirik yang menunjukan salah kaprahnya PKN dari visi dan misinya, sebagai berikut:

Pembelajaran dan penilaian dalam PKN lebih menekankan pada dampak Instructional yang terbatas pada penguasaan materi atau dengan kata lain hanya menekankan pada dimensi kognitifnya saja. Sedangkan pengembagnan dimensi-dimensi lainnya (afektif dan psikomotorik) dan pemerolehan dampak pengiring sebagai *hidden curriculum* belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Selain dari keterisolasian proses pembelajaran dari konteks keilmuan lain, proses pembelajaran yang dilaksanakan juga belum mampu mencakup semua aspek yang seharusnya dimiliki oleh siswa, yaitu tidak hanya aspek kognitif juga

aspek afektif dan psikomotorik. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Winataputra dan Budimansyah (2007:118) yaitu:

Proses pembelajaran dan penilaian dalam PKN lebih menekankan pada dampak instruksional (*Instructional effect*) yang terbatas pada penguasaan materi (*content Mastery*) atau dengan kata lain hanya menekankan pada dimensi kognitifnya saja. Sedangkan pengembangan dimensi-dimensi lainnya (afektif dan psikomotorik) dan pemerolehan dampak pengiring (*nurturant effect*) sebagai “*hidden curriculum*” belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Dari hasil penelitian lapangan, pada cluster 1 SMAN di kota Bandung yang memiliki passing grade tertinggi, penerapan Pendidikan Kewarganegaraan masih bersifat formal dan mengutamakan konten, yaitu dijelaskan sebagai berikut:

“... dilihat dari pendekatan dan proses belajarnya, pembelajaran PKN di SMA Negeri 2 Bandung bersifat konvensional, yang ditandai oleh rendahnya kreatifitas guru dalam pengembangan kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan ke dalam silabus dan RPP. Pembelajaran hanya dilakukan di dalam kelas, didominasi oleh metode ceramah dan diskusi, dan menekankan pada penguasaan materi semata, fasilitas pembelajaran yang tersedia tidak dimanfaatkan secara maksimal, sehingga pembelajaran PKN di SMA Negeri 2 Bandung bersifat formal dan mengutamakan konten. Permana (2007:125)”

Selain itu, penelitian lain ditemukan pada cluster 2 SMAN di Kota Bandung, yang menyatakan bahwa “Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di SMAN 24 Bandung masih didominasi oleh pengembangan aspek kognitif, yang menyebabkan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bersifat *didactic transmission*” Satria (2008:161).

Dalam memperbaiki permasalahan dalam pembelajaran PKN, diperlukan suatu bentuk pembelajaran PKN yang bersifat ideal, dimana menurut Charles B. Myers dalam Kosasih Djahiri (2007:23-24) berpendapat bahwa:

Proses pembelajaran yang ideal adalah proses KBS yang *active – powerful* (aktif dan berkelanjutan) - demokratis dan humanistik serta menyenangkan. Aktif dan powerful karena bahan ajar, kegiatan, media dan sumber mampu mengundang, melibatkan dan memberdayakan (empowering) seluruh potensi diri dan lingkungan belajarnya serta mampu membina siswa menjadi independent dan *self-regulated learners*.

Dengan demikian, seluruh komponen PKN yang terdiri dari *Civic Knowledge, Civic Skill, dan Civic Disposition* akan dapat terpenuhi. Tidak hanya melibatkan aspek kognitif akan tetapi aspek afektif dan psikomotorik juga dapat terasah. Disisi lain, Budimansyah (2002:5) mengemukakan bahwa sebagai sebuah institusi penting, sekolah perlu menciptakan kehidupan yang demokratis. Pembelajaran PKN yang demokratis dimaksudkan sebagai berikut:

...proses pembelajaran yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, yaitu penghargaan terhadap kemampuan, menjunjung keadilan, menerapkan persamaan kesempatan dan memperhatikan keragaman peserta didik. Dalam prakteknya, para pendidik hendaknya memposisikan peserta didik sebagai insan yang harus dihargai kemampuannya dan diberi kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran perlu adanya suasana yang terbuka, akrab, dan saling menghargai. Sebaliknya perlu menghindari suasana belajar yang kaku, penuh dengan ketegangan.

Dengan adanya pembelajaran yang dilakukan secara akrab dan terbuka diharapkan siswa menjadi semangat, senang serta antusias untuk mengikuti pembelajaran, sehingga kesan siswa, yang selalu merasa bosan terhadap mata pelajaran PKN tidak akan terjadi. Siswa akan lebih aktif serta kreatif dan berani dalam menyampaikan ide serta opini yang ia miliki. Hal ini akan dapat dilaksanakan dengan lebih optimal apabila siswa telah memiliki kemampuan kognitif yang tinggi, mislakan siswa yang berada pada cluster 1 dan cluster 2 (*cluster* dengan perolehan *passing grade* UN tertinggi di kota Bandung). Karena

pengetahuan awal yang dimiliki akan menjadi stimulus bagi siswa untuk bertanya akan hal yang baru kemudian melakukan diskusi dengan siswa lainnya, sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan serta bermakna bagi siswa.

Hal penting lainnya, adalah seorang pengajar atau guru, yang tidak memiliki sifat *extrem propagandis*, yaitu guru yang tidak melatih siswa berfikir logis, kritis, sistematis, kreatif, dan analitis, namun justru mengarahkan siswa berfikir yang loncat-loncat seperti binatang kangguru, akibatnya siswa bersifat pasif. (Wuriyan dan Syaifullah, 2006: 41).

Secara visual, kerangka pikiran di atas ditunjukkan dalam bagan sebagai berikut :





